



TIPISNYA PENGAMALAN SILA KE 5 DALAM KONTEKS IDEOLOGI PANCASILA

Cantika Maharani

cantikamaharani.mrr06@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kholid Junaidi

kholedjunedy@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Indah Nola

indahnola08@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Suci Rahmadani

sucijuntak67@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Jl. HR. Soebrantas Km, 15 No, 155 Kel, Tuah Madani Kec, Tuah Madani – Pekanbaru

Korespondensi penulis: *cantikamaharani.mrr06@gmail.com*

Abstract. *This article discusses the application of the 5th principle of Pancasila, namely "Social justice for all Indonesian people", in the context of Pancasila Ideology. Even though Pancasila as the basis of the state has been widely recognized and accepted, the implementation of the principles of social justice often encounters obstacles. This research was conducted using literature research to explore the factors that influence the low level of practice of the 5th principle in different social environments. The results show that there is a gap between Pancasila values and social realities, such as economic inequality, inequality in access to education and political participation. This review outlines strategic steps to strengthen the practice of the Fifth Principle, including character education, increased community engagement, and fair application of the law. We hope that this study can provide a broad and effective contribution to the understanding and practice of Pancasila ideology.*

Keywords: *Pancasila, 5th Principle, Social Justice, Practice.*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang penerapan sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dalam konteks Ideologi Pancasila. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara telah diakui dan diterima secara luas, namun penerapan prinsip keadilan sosial seringkali menemui kendala. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat praktik prinsip ke-5 dalam lingkungan sosial yang berbeda. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan realitas sosial, seperti ketimpangan ekonomi, ketimpangan akses pendidikan, dan partisipasi politik. Tinjauan ini menguraikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat praktik Prinsip Kelima, termasuk pendidikan karakter, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan penerapan hukum yang adil. Kami berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi yang luas dan efektif terhadap pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, sila kelima, keadilan sosial, pengamalan.

LATAR BELAKANG

Ideologi mempunyai makna yang sangat mendalam, terutama berkaitan dengan cita-cita dan tujuan negara. Karena setiap negara, setiap bangsa mempunyai cita-cita dan tujuan nasionalnya masing-masing. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu kerangka nasional yang memuat gagasan dan nilai-nilai fundamental yang dapat menjadi pedoman dan “kompas” dalam membimbing bangsa, negara terkait. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik agama, budaya, suku, dan bahasa. Pancasila dibangun sebagai ideologi yang mampu menampung dan menyatukan segala keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan negara yang merdeka. Pancasila dianggap sebagai dasar negara, yang tidak hanya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi dasar bagi tercapainya tujuan bersama yaitu kemerdekaan, persatuan, dan kebahagiaan rakyat. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan Pancasila. Pancasila harus menjadi pedoman bagi seluruh tindakan dan perilaku seluruh warga negara Indonesia. Prinsip kelima, yang menekankan keadilan sosial, harus menjadi landasan kebijakan publik dan perilaku sosial. Namun berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bahwa penerapan sila tersebut belum optimal. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam membentuk jati diri bangsa. Lima sila Pancasila merupakan pedoman moral yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Namun penerapan prinsip kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seringkali dinilai sulit dicapai secara adil dan inklusif. Artikel ini akan membahas tentang batasan pengamalan sila ke-5 dalam kehidupan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian kepustakaan dengan metode penggalan sumber informasi dari berbagai artikel dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan melakukan penelusuran kepustakaan, peneliti akan merinci dan menganalisis berbagai publikasi, antara lain artikel ilmiah, buku penelitian, dan sumber ilmu lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan kerangka konseptual yang diadaptasi dari literatur tingkat lanjut untuk membangun landasan teori penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Sila Ke-5 Dalam Pancasila

Keadilan sosial dalam konteks Sila Kelima mengacu pada keadilan sosial, baik sosial, ekonomi, agama, dan lain-lain. Semua warga negara, tanpa memandang asal etnis atau kelompoknya, mempunyai hak atas perlakuan yang adil dalam penegakan hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Prinsip kelima didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan menyangkut pemerataan kekayaan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Nilai-nilai ini mengharuskan seluruh individu di Indonesia mendapatkan manfaat dari sumber daya pemerintah secara adil dan tanpa diskriminasi.

B. Kenyataan Di Lapangan

Sayangnya pengamalan sila ke-5 di Indonesia masih minim. Beberapa indikator yang membuktikan hal tersebut adalah:

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat kesenjangan besar dalam tingkat kesejahteraan di Indonesia, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah terpencil masih tertinggal jauh dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan publik. Masyarakat kelas bawah seringkali kesulitan mengakses fasilitas dasar, sehingga memperlebar kesenjangan sosial.

2. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan

Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih minim di banyak daerah terpencil di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Pendidikan, terdapat kesenjangan besar dalam kualitas dan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga berdampak pada masa depan mereka.

3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi yang terkait dengan pendanaan publik untuk kesejahteraan sosial seringkali mempengaruhi efektivitas program sosial. Transparansi Internasional memberi peringkat Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi, yang belum mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini

menunjukkan bahwa dispensasi keadilan sosial seringkali terhambat oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tipisnya Pengamalan Sila Ke-5

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pengamalan Sila Ke-5 disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kebijakan pemerintah yang belum berada pada jalur yang benar Meski diciptakan untuk mengurangi ketimpangan melalui berbagai program seperti bantuan langsung tunai dan Kartu Indonesia Pintar, namun penyalurannya masih tunduk pada berbagai kendala teknis dan birokrasi. Mereka menghadapi kendala besar dan seringkali tidak mampu menjangkau segmen masyarakat yang paling membutuhkannya.
2. Budaya patronase dan nepotisme Budaya patronase dan nepotisme dalam birokrasi dan dunia usaha meningkatkan kesenjangan. Koneksi sosio-politik seringkali memainkan peran yang lebih besar dalam distribusi manfaat ekonomi dibandingkan keterampilan dan prestasi individu.
3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kesadaran masyarakat akan haknya atas keadilan sosial masih minim. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan sering kali rendah, sehingga suara kelompok marginal tidak dipertimbangkan secara memadai dalam kebijakan publik.

D. Usaha Perbaikan

Diperlukannya usaha untuk mengatasi beberapa faktor yang mempengaruhi tipisnya pengamalan sila ke-5 yaitu:

1. Memperkuat kebijakan yang berbasis pada keadilan sosial Pemerintah harus memperbaiki kebijakan yang fokus pada pemerataan keadilan, terutama kepada kelompok yang kurang beruntung dan rentan. Pembangunan dan pemerataan layanan dasar merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
2. Penguatan penegakan hukum terhadap korupsi Penegakan hukum terhadap korupsi yang merugikan masyarakat harus lebih konsisten dan komprehensif agar sumber daya publik benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan.
3. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Nasional Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada hak dan tanggung jawab sosial akan

membantu masyarakat memahami pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Rendahnya Pengamalan sila ke-5 dalam ideologi Pancasila menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam mencapai keadilan sosial di Indonesia. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, dan maraknya korupsi menjadi kendala utama. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, memerlukan upaya bersama berbagai elemen pemerintah, masyarakat, dan negara agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan rasa keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Karsadi, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi: Upaya Membangun Moral Dan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2014)
- Indra Kristian, *Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Bandung, ALFABETA, cv, 2019)
- Soekarno, Disusun oleh Panitia Kongres Pancasila IX, *Pancasila Dasar Negara*, (Universitas Gadjah Mada: 2017)
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, 2016)
- Yunie Herawati, 2014 *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila ke-5 Pancasila* vol. 18 no. 1 Januari 2014
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), *Statistik Kemiskinan di Indonesia 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>